DPR: Kementerian Perdagangan Harus Rumuskan Peraturan Yang Beri Perlindungan Masyarakat Terkait Transaksi Kripto

Tanggal	: Rabu , 30 Juni 2021
Media	: Indonesiainside.id
Halaman	: -
Wartawan	: AH Kholis
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Tommy Kurniawan *(Anggota Komisi VI DPR RI)*, Aria Bima *(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: Kripto

DPR: Kementerian Perdagangan Harus Rumuskan Peraturan yang Beri Perlindungan Masyarakat Terkait Transaksi Kripto

Oleh **AH Kholis** — Rabu, 30/06/2021 18:32 WIB



mata uang kripto

Bagikan di Facebook Bagikan di Twitter

Indonesiainside.id, Jakarta—Fenomena aktivitas pasar di bursa aset kripto harus dibarengi dengan peraturan yang memadai serta informasi dan edukasi yang cukup dari pemerintah. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan beberapa keresahan di publik.

Bahasan ini mengemuka dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/6). Fraksi PKB melalui Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan menilai bahwa aset digital ini masih sangat belum jelas peraturan dan keamanannya, sehingga menurutnya BAPPEBTI harus memperketat transaksi di bursa.

"Nilai yang sangat fluktuatif itu yang ada di kripto ini seringkali membuat mereka menjadi loss ya atau mengalami kerugian dikarenakan tidak memahami ilmunya. Karena kan kalau hitungan kripto ini sangat tergantung dengan waktu, misal di pagi harga sekian, siang sekian sehari sekian berapa bulan itu bisa naik dan sebagainya," jelas Tommy, dikutip laman resmi DPR, Rabu (30/6).

Baca Juga:

- **Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid Setuju Merger Pelindo**
- **Anggota Komisi IV: Sayangkan Kondisi Keamanan Produk Ekspor Perikanan**
- **Kasus Covid-19 pada Anak Meningkat, Anggota DPR Minta Orangtua Fokus dalam Pengawasan**

Tommy meminta BAPPEBTI untuk memberikan edukasi mengenai pemahaman cara berbelanja dan bermain di bursa kripto tersebut dengan mengedepankan konsep informasi yang disukai kaum milenial. Menurutnya hal ini penting supaya tidak terjadi masalah-masalah baru yang dihadapi kaum milenial.

"Saya kira masukan dari kami adalah BAPPEBTI harus membuat semacam edukasi terkait masalah kripto ini agar anak-anak milenial khususnya yang tertarik dengan perdagangan komoditi kripto ini bisa memiliki ilmu yang lebih memadai sehingga kerugian yang mereka alami bisa lebih minim. Ini sangat menarik sekaligus berbahaya bagi anak yang secara finansial masih terbatas," imbuh legislator dapil Jawa Barat V itu.

Melanjutkan pembahasan tentang aset kripto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa BAPPEBTI wajib memperketat transaksi perdagangan asset kripto. Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, kripto memang menjanjikan, namun ada sejumlah risiko aset kripto yang perlu dicermati lebih lanjut.

"Karena aset kripto ini adalah merupakan jenis komoditi sebagai alat pembayaran yang sah yang saat ini ada. Tetapi asset kripto itu memiliki nilai fluktuatif yang tidak terkendali yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun, sehingga masyarakat ini harus betul-betul paham dari awal potensi-potensi risikonya dari awal sebelum melakukan transaksi kripto ini," terangnya.

Untuk itu legislator dapil Jawa Tengah V tersebut meminta Kementerian Perdagangan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih besar yang dapat mengatur dan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia. (NE)